

| INDUSTRI ALAT KESEHATAN |

Bergerak Cepat Demi Pasok Alat PelindungIpek Ayu H. Nurcaya & Andi M. Arief
redaksi@bisnis.com

Derasnya keluhan akan minimnya pasokan alat pelindung diri (APD) maupun alat kesehatan lain yang dibutuhkan tenaga medis dalam beberapa minggu terakhir, membuat pemerintah mau tak mau bergerak cepat. Pelaku usaha pun tak mau ketinggalan.

Langkah cepat dalam mengisi suplai APD memang menjadi sebuah keharusan, karena tenaga medis berada di garda depan dalam menuntaskan pandemi corona atau COVID-19.

Pemerintah mencatat saat ini telah ada 30 perusahaan baik yang lama bergerak di bidang alat pelindung diri (APD) atau perusa-

haan eksis yang mendiversifikasi produknya.

Dari seluruh produsen APD yang ada, lima perusahaan sedang menggenjot produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan ditargetkan mulai produksi awal April 2020. Pemerintah pun menjamin kebutuhan bahan baku sudah tersedia untuk mengejar distribusi pada akhir April 2020 sebanyak 5 juta-10 juta paket APD.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Elis Masi-toh mengatakan keseluruhan perusahaan tersebut tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. "Harapannya itu APD akan diproduksi sebanyak 17,8 juta paket per bulan dan untuk baju medis atau *surgical gown* sebanyak 508.800

paket per bulan," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (31/3).

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah COVID-19, industri APD di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. "Dengan keterlibatan industri tekstil, kapasitas produksi APD kita bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kami proyeksi, hingga Mei 2020 kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3—5 juta unit," katanya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengemukakan diversifikasi produk yang dilakukan oleh industri tekstil dalam rangka penanganan COVID-19, menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan

kebutuhan APD dan masker yang sangat tinggi saat ini. "Hal ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri," katanya.

Industriawan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Rabu (1/4) pun melakukan rapat jarak jauh untuk membahas kesiapan pabrikan.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) menyatakan kendala utama produksi APD dan masker tersebut dinilai datang dari perbedaan data di antar-kementerian.

"Dari [industri] garmen dan [industri] alat kesehatan sudah mengalihkan produksinya ke APD semua. Jadi, untuk stok APD dan masker aman. Cuma, ada perbedaan data

[jumlah kebutuhan] antara kementerian. Ada yang bilang 4 juta, ada yang bilang 12 juta, padahal kita sudah bisa produksi 10 juta unit APD," kata Sekjen Inaplas Fajar Budiono kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Oleh karena itu, Fajar mengemukakan sebagian produsen meminta izin untuk mengekspor APD maupun masker jika kebutuhan dalam negeri telah dipenuhi. "Diekspor akan barter dengan produk lain yang [industri di] Indonesia tidak bisa bikin, contohnya ventilator. Jadi, kami kirim dan bayarannya bentuk ventilator," ucapnya.

Kini, mari kita semua berharap percepatan dan peningkatan produksi APD maupun alkes lainnya ini dapat memberikan senjata tambahan dalam perang melawan pandemi COVID-19.

| PROYEKSI KINERJA |

JALAN MANUFAKTUR KIAN TERJAL

Bisnis, JAKARTA — Kinerja sektor manufaktur diperkirakan tertekan lebih dalam pada periode April hingga Mei 2020 selama pandemi COVID-19 belum teratasi.

Ipek Ayu H. Nurcaya & Andi M. Arief
redaksi@bisnis.com

Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur yang dirilis oleh IHS Markit pada Maret 2020 anjlok ke angka 45,3, terendah sejak 2011. Adapun, level 50 ke atas mencatatkan adanya ekspansi. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan mengatakan pihaknya memang telah memprediksi PMI Maret Indonesia akan anjlok.

"Desember sampai Januari banyak pembatasan impor lalu Februari bahan baku sudah masuk dan kegiatan ekspor masih lancar. Lalu Maret mulai COVID-19 [merebak] jadi memang p a s t i

PMI menurun. Namun, saya kira masih akan lebih rendah lagi nanti April—Mei," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Johnny mengemukakan saat ini posisi konsumsi sedang turun karena adanya pembatasan dan protokol kesehatan, artinya penjualan pun menurun. Di sisi produksi, bahan baku juga mulai habis.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai kuartal II/2020 ini nantinya akan menjadi puncak tekanan pada industri. Dia juga menyayangkan pemerintah yang masih berantakan dalam koordinasi penanganan COVID-19 ini.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinwa W.

Kamdani mengimbau agar seluruh pabrikan menggunakan semua opsi untuk mempertahankan eksistensi dalam kondisi krisis seperti saat ini. Shinta meminta pada pabrikan yang masih memiliki permintaan untuk menggenjot kapasitas produksinya.

Sementara itu, pabrikan yang pasarnya menyusut disarankan agar melakukan restrukturisasi utang, memanfaatkan stimulus, renegosiasi kontrak dengan klien, menurunkan kapasitas produksi, atau mengalihkan produksi.

"Kalau *demand* sangat berkurang hingga mendekati 100%, opsi menutup perusahaan pun kami dukung asal dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab dan tidak merugikan pihak lain."

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai penurunan tajam PMI pada akhir kuartal I/2020 dipengaruhi oleh banyaknya daerah yang terjangkit COVID-19.

Alhasil, penurunan utilitas pabrikan di berbagai

sektor manufaktur tidak dapat dihindari.

"Beberapa industri mengalami penurunan kapasitas [produksi] hampir 50%, kecuali industri-industri alat-alat kesehatan dan obat-obatan," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Agus berujar pihaknya akan mengusahakan pemberian berbagai stimulus fiskal dan non-fiskal. Menurutnya, hal tersebut merupakan antisipasi banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (*lockdown*) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan jika merujuk pada proyeksi pemerintah, maka ekonomi Tanah Air akan masuk gelombang resesi jika sampai akhir kuartal II/2020 belum ada perbaikan dari tekanan COVID-19.

Hal itu, lanjut Andry mengindikasikan PMI berpeluang makin merosot usai periode Maret.

"Mungkin kuartal II/2020 ini menjadi puncak karena sebulan saja sudah begitu ter tekan l a l u s a m p a i April i n i

belum ada perbaikan penanganan COVID-19. Paling saya takutkan jika PMI kita di level 40," ujarnya.

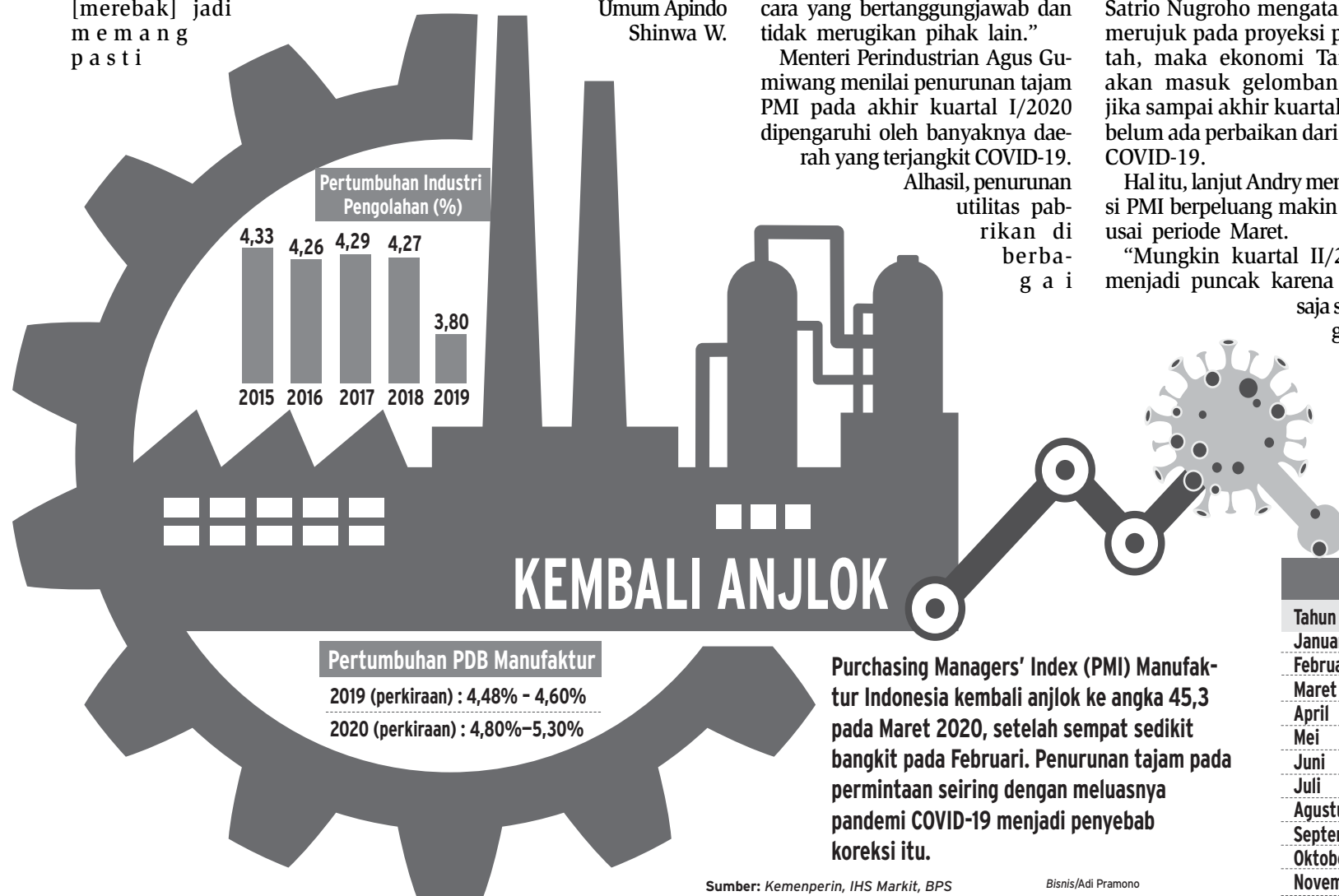
Meski demikian, Andry, memprediksi jika level PMI di Indonesia menyentuh 40 dan memasuki gelombang resesi, kemungkinan industri juga bukan berada pada posisi sepenuhnya berhenti produksi. "Yang tetap bekerja manufaktur ada tapi mungkin lebih banyak padat modal, sejumlah sektor farmasi dan kesehatan yang berkaitan dengan sektor kesehatan juga saya rasa masih akan berproduksi."

Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Myrdal Gunarto sepakat kejadian perlambatan aktivitas ekonomi maupun manufaktur ini merupakan kejadian luar biasa pertama sejak Indonesia merdeka.

Alhasil, belum ada *proxy* yang tepat untuk melihat arah tren bagi laju perekonomian dari kondisi ini. "Angka PMI Manufaktur yang menunjukkan kontraksi aktivitas itu wajar. Malah angkanya bisa lebih rendah lagi pada April dan Mei," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Menurut Myrdal, hal itu karena pada April kemungkinan aktivitas manufaktur banyak yang terhenti akibat langkah pengamanan untuk menghindari penyebaran virus.

Sementara itu, pada Mei ada momentum Puasa dan Lebaran yang akan makin melonggarkan aktivitas manufaktur. ■



Sumber: Kemenperin, IHS Markit, BPS

Bisnis/Adi Pramono

PMI Manufaktur Indonesia					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	48,9	50,4	49,9	49,4	49,3
Februari	48,7	49,3	51,4	50,1	51,9
Maret	50,6	50,5	50,7	51,2	45,3
April	50,9	51,2	51,6	50,4	
Mei	50,6	50,6	51,7	51,6	
Juni	51,9	49,5	50,3	50,6	
Juli	48,4	48,6	50,5	49,6	
Agustus	50,4	50,7	51,9	49	
September	50,9	50,4	50,7	49,1	
Oktober	48,7	50,1	50,5	47,7	
November	49,7	50,3	50,4	48,2	
Desember	49	49,3	51,2	49,5	

| STIMULUS HADAPI COVID-19 |

Keringanan Tarif Listrik Nonsubsidi Dikaji

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengkaji sejumlah stimulus berupa keringanan tarif listrik untuk sektor industri, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pelanggan lainnya di tengah meluasnya pandemi virus corona (COVID-19).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan pemerintah berupaya memitigasi risiko dan melakukan antisipasi mengingat belum ada yang dapat mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

Saat ini, katanya, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tengah menyiapkan

dan mengkaji stimulus keringanan biaya listrik untuk sektor industri, UMKM, dan pelanggan rumah tangga nonsubsidi daya 900 VA ke atas.

"Sepertinya akan dikeluarkan lagi stimulus untuk yang lainnya termasuk di antaranya sektor industri. Mohon dimaklumi, kami masih mengkajinya," ujarnya dalam konferensi video, Rabu (1/4). Saat ini, pemerintah masih menginventarisasi dampak di lapangan termasuk skenario yang dapat dilakukan dalam rangka membantu dari bidang ketenagalistrikan.

"Kami lagi cari masukan, keluhan, dari lapangan, contoh sudah ada industri

yang minta penanguhan pembayaran, sudah ada. Kami antisipasi itu semua," tuturnya.

Dia menambahkan pemerintah berkoordinasi bersama PLN dan Kementerian Keuangan terkait pengeluaran paket kebijakan berupa pemberian stimulus itu.

Sebelumnya, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan listrik melalui pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA bersubsidi dalam Perpu No. 1/2020. "Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada

setiap periode pembayaran," kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini melalui keterangan resmi, Rabu (1/4).

Untuk pelanggan prabayar, lanjutnya, akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir yakni dari Januari hingga Maret ini.

"Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya," jelasnya. Adapun, pelanggan yang terlanjur membeli token, token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan. (Yanita Petriella)

www.bca.co.id

**RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang sebelumnya juga telah diumumkan di harian *Bisnis Indonesia* dan *The Jakarta Post* pada tanggal 11 Maret 2020. Ralat pemanggilan ini dilakukan sehubungan dengan perubahan tempat penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski - Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, diubah menjadi di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.

Sehingga informasi mengenai penyelenggaraan Rapat menjadi sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2020
Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat : Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Jakarta, 2 April 2020
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi